



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YEFRINALDI
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 252543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	420.125.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.778 m2/264 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 189.875.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/42 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA SOLOK, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
5. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
6. Tanah Seluas 7.570 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 18.375.000		
7. Tanah Seluas 7.170 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 24.500.000		
8. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 18.375.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	200.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	381.763.630



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.011.888.630

III. HUTANG

Rp. 97.556.459

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 914.332.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.